

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk mencapai perekonomian yang terus tumbuh sekaligus pemerataan manfaat pertumbuhan bagi semua kalangan masyarakat, yakni pemerataan kesejahteraan (Raswita & Made, 2013). *Trade off* antara fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau mencapai tujuan pemerataan kesejahteraan menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan. Menurut Mopangga (2011), ekonomi yang terus tumbuh dan tinggi tidak secara otomatis mencerminkan bahwa jurang pemisah pembangunan antar daerah tidak terjadi.

Ketimpangan pembangunan daerah menyebabkan adanya wilayah maju (*developed region*) dan wilayah tertinggal (*underdeveloped region*). Menurut Sjafrizal (2012), faktor alamiah yang menjadi penyebab timbulnya ketimpangan pembangunan adalah perbedaan yang kontras dari komposisi sumber daya yang dimiliki oleh tiap daerah. Selain itu, faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan diantaranya adalah kondisi kependudukan, kelancaran mobilitas

barang dan jasa, terpusatnya kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu, dan ketimpangan dana yang dimiliki oleh tiap daerah.

Kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam mengatasi ketimpangan dan mewujudkan pembangunan yang merata salah satunya adalah Kebijakan Otonomi Daerah. Kebijakan Otonomi Daerah baru berlaku di Indonesia sejak tahun 2001 dibawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa daerah otonom memiliki keleluasan untuk menentukan kebijakan pembangunan ekonomi daerahnya sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang merata dengan menggunakan sebagian dana dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah otonom sendiri (Aminah, 2017).

Provinsi Banten merupakan daerah otonom yang disahkan dan diundangkan sejak 17 Oktober 2000 melalui UU Nomor 23 Tahun 2000. Sebelum menjadi provinsi yang berdiri sendiri, awalnya Banten menjadi bagian tak terpisahkan dari Provinsi Jawa Barat. Oleh karena Banten ingin menjadi daerah yang mandiri, maka pada tahun 2000, Banten berpisah dari Jawa Barat dan menjadi provinsi ke-30 di Indonesia, yakni Provinsi Banten.

Secara administratif, Provinsi Banten terdiri dari empat kabupaten yakni Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kab. Serang, dan Kab. Tangerang serta empat kota yakni Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Tiap kabupaten/kota memiliki kondisi dan karakteristik daerah yang berbeda-beda baik bagi segi ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan terdapat perbedaan yang kontras atau ketimpangan atas

kemampuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan antar wilayah.

Penelitian Utami (2018) yang juga menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten tahun 2011–2015, menyatakan bahwa tingkat ketimpangan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Namun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2011 tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten mencapai angka 0,7667 dan meningkat hingga pada tahun 2015, yakni mencapai 0,7774. Adapun alat ukur ketimpangan yang digunakan adalah Indeks Williamson. Indeks Williamson merupakan indeks yang menunjukkan tingkat ketimpangan antar daerah di suatu wilayah dengan pendapatan per kapita tiap daerah sebagai basis data analisis.

Provinsi Banten memiliki potensi yang tinggi dalam peningkatan pertumbuhan dan pembangunan. Hal tersebut dikarenakan Provinsi Banten berada pada lokasi yang strategis, yaitu sebagai penghubung pulau Jawa dan pulau Sumatera. Selain itu, Provinsi Banten juga berdekatan dengan Ibukota Negara dan Kawasan Metropolitan Jakarta Raya. Provinsi Banten juga merupakan salah satu kawasan tujuan investasi terbesar karena dukungan infrastruktur yang baik seperti Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Merak, Jalan Bebas Hambatan Jakarta - Merak, Jaringan Jalan Kereta Api dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis ulang tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten dengan menggunakan data dan kondisi terbaru.

Pada tahun 2020, Indonesia mengalami kondisi terbaru yang tidak pernah terselami. Virus covid-19 mulai menyerang tanah air. Menurut WHO, Virus

COVID-19 (disebut juga SARS-CoV2) yang berasal dari China merupakan virus berbahaya yang menyerang sistem pernapasan dan dapat menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu hingga yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Pesatnya penyebaran virus covid-19 membuat dunia mengalami Pandemi yang berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan di dunia, terutama aspek ekonomi.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan dan penanganan kasus covid-19 yang terus bertambah seperti kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Atas kebijakan tersebut banyak pelaku ekonomi harus memutar strategi untuk bertahan dan memastikan kegiatan ekonomi tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19. Alih-alih menekan laju penyebaran virus covid-19, kebijakan pembatasan sosial kian mengubah tatanan ekonomi secara brutal. Perekonomian Indonesia bahkan hampir lumpuh.

Tabel I.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten dengan Provinsi Lainnya di Pulau Jawa Tahun 2016-2020 (Persen)

Provinsi	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DKI Jakarta	5,87	6,20	6,11	5,82	-2,36
Jawa Barat	5,66	5,33	5,65	5,07	-2,44
Jawa Tengah	5,25	5,26	5,30	5,40	-2,65
DI Yogyakarta	5,05	5,26	6,20	6,59	-2,69
Jawa Timur	5,57	5,46	5,47	5,52	-2,39
Banten	5,28	5,75	5,77	5,29	-3,38
<b>Indonesia</b>	<b>5,03</b>	<b>5,07</b>	<b>5,17</b>	<b>5,02</b>	<b>-2,07</b>

Sumber : Diolah dari data BPS

Berdasarkan Tabel I.1, saat pandemi menyerang, laju pertumbuhan ekonomi secara nasional minus, termasuk provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Provinsi Banten merupakan daerah yang paling terdampak di Pulau Jawa. Provinsi Banten mengalami pertumbuhan ekonomi minus terdalam di Pulau Jawa, hingga 3,38

persen bahkan dampaknya lebih besar dibandingkan secara nasional yang mencapai pertumbuhan minus 2,07 persen. Padahal sebelum pandemi COVID-19 menyerang, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten lebih besar daripada laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar perubahan tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten terhadap pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu akibat Pandemi COVID-19.

Identifikasi awal adanya ketimpangan pembangunan adalah produk domestik bruto (PDRB) per kapita yang tidak merata pada tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Menurut Tambunan (2001), PDRB per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi. Namun demikian, tingkat PDRB per kapita yang diperoleh belum mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya. Ada kemungkinan nilai PDRB per kapita dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat.

Tabel I.2 PDRB Perkapita atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Ribuan Rupiah)

Kabupaten/Kota PDRB	Tahun	
	2016-2019	2020
Kabupaten Pandeglang	15.171	16.145
Kabupaten Lebak	14.884	15.780
Kabupaten Tangerang	24.592	23.931
Kabupaten Serang	33.720	35.196
Kota Tangerang	47.811	45.275
Kota Cilegon	160.003	166.206
Kota Serang	30.991	32.210
Kota Tangerang Selatan	32.390	33.084
Provinsi Banten	33.761	33.864

Sumber : Diolah dari BPS

Berdasarkan tabel I.2 di atas, terdapat Kabupaten/Kota yang mampu memperoleh PDRB per kapita sangat tinggi, dan ada pula yang mampu memperoleh

PDRB per kapita sangat rendah. Kota Cilegon mampu memperoleh rata-rata PDRB per kapita tertinggi hingga ratusan juta rupiah, sedangkan kabupaten/kota yang lain hanya mampu memperoleh puluhan juta rupiah, bahkan Kabupaten Pandeglang hanya mampu memperoleh rata-rata PDRB per kapita sebesar 15jt-an. Sementara, apabila dikaitkan dengan kondisi saat ini, pandemi covid-19 tidak menyebabkan penurunan pada PDRB per kapita masyarakat Provinsi Banten secara keseluruhan, hanya Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang yang mengalami penurunan PDRB per kapita dari sebelum pandemi ke masa pandemi.

Meskipun saat pandemi covid-19 pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten mengalami minus terdalam se-Pulau Jawa, secara umum tingkat kesejahteraan (PDRB per kapita) Provinsi Banten sedikit meningkat dari sebelum adanya pandemi. Namun, ketimpangan pembangunan tetap terjadi. Oleh karena itu, peneliti tertarik pula untuk mengetahui korelasi antara tingkat ketimpangan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten sebelum dan semasa pandemi Covid-19.

Hipotesis Kuznet merupakan hipotesis yang melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan pembangunan (Kuznets, 1955). Hipotesis Kuznet menyatakan bahwa ketimpangan pembangunan pada permulaan proses pembangunan terus meningkat hingga mencapai titik puncak pertumbuhan ekonomi. Setelah proses pembangunan yang dilakukan sudah maksimal maka manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat regional semakin merata, sehingga ketimpangan pembangunan

akan menurun. Dengan demikian ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian regional memiliki hubungan negatif (Sutarno dan Kuncoro, 2004).

Pengujian Hipotesis Kuznets akan dilakukan menggunakan alat analisis Korelasi Pearson untuk melihat korelasi antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan (Indeks Williamson) pada Provinsi Banten. Korelasi dapat bernilai negatif atau positif. Apabila korelasi bernilai negatif, itu artinya Hipotesis Kuznet di Provinsi Banten berlaku, yang menggambarkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka tingkat ketimpangan pembangunan akan menurun (Subagyo dan Djarwanto, 2005:288).

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat judul KTTA yakni “Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pengujian Hipotesis Kuznet Di Provinsi Banten Sebelum Dan Semasa Pandemi Covid-19”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- 1) Apakah terdapat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sebelum Pandemi Covid-19 (pada tahun 2016-2019)?
- 2) Apakah terdapat perubahan tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten saat Pandemi Covid-19 menyerang Indonesia (tahun 2020)?
- 3) Apakah Hipotesis Kuznet berlaku di Provinsi Banten pada sebelum dan semasa pandemi covid-19?

- 4) Apa saja faktor penyebab peningkatan tingkat ketimpangan pembangunan semasa Pandemi Covid-19 ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan yang diharapkan untuk dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/kota di Provinsi Banten sebelum pandemi Covid-19 yaitu pada periode 2016—2019.
- 2) Mengetahui perubahan tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/kota di Provinsi Banten semasa pandemi Covid-19 menyerang dan mewabah di Indonesia pada tahun 2020.
- 3) Mengetahui korelasi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangaun antar Kabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2016–2020.
- 4) Mengetahui Faktor penyebab peningkatan tingkat ketimpangan antar Kabupaten/kota di Provinsi Banten semasa Pandemi Covid-19.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan karya tulis ini berfokus pada analisis komparatif ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/kota di Provinsi Banten sebelum dan semasa pandemi Covid-19 serta korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan antar Kabupaten/kota di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan data dasar diantaranya adalah pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Banten, PDRB per kapita ADHK masing-masing Kabupaten/kota,

rata-rata PDRB per kapita ADHK Provinsi Banten, dan Jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/kota dan Provinsi Banten.

Adapun periode sebelum pandemi COVID-19 dibatasi dalam rentang tahun 2016—2019 alasannya karena pada rentang waktu tersebut, keadaan ekonomi makro dalam kondisi normal. Sedangkan periode masa pandemi COVID-19 adalah tahun 2020. Alat-alat analisis yang digunakan adalah Indeks Williamson untuk menentukan tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/kota di Provinsi Banten, dan alat analisis Korelasi Pearson untuk mengetahui korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan pembangunan Indeks Williamson.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari penulisan karya tulis ini antara lain :

- 1) Memberi tambahan informasi dan bahan kajian tentang perubahan tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/kota di Provinsi Banten akibat pandemi Covid-19.
- 2) Sumbangan pemikiran untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah dalam meningkatkan, mengoptimalkan dan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada di daerah bagi kemakmuran masyarakat.
- 3) Bagi pemerintah, penyusunan karya tulis ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang merata khususnya bagi Kabupaten/kota yang tertinggal dan paling terdampak oleh pandemi COVID-19.

- 4) Dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi dalam melakukan penelitian dengan tema yang sejenis.

### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

Untuk memberikan gambaran karya tulis, penulis membuat rancangan sistematika penulisan KTTA secara singkat dan jelas yang berisi materi yang akan dibahas pada setiap bab. Adapun sistematika karya tulis yang dirancang adalah sebagai berikut.

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penulisan
- 1.4 Ruang Lingkup Penulisan
- 1.5 Manfaat Penulisan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- 2.1 Pembangunan Ekonomi Daerah
- 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Regional
- 2.3 Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

- 2.4 Faktor Adanya Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah
- 2.5 Indeks Williamsom
- 2.6 Tipologi Klassenn
- 2.7 Hipotesis Kuznet
- 2.8 Penelitian Terdahulu

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

- 3.1 Metode Pengumpulan Data
- 3.2 Definisi Operasional Variabel
- 3.3 Gambaran Umum Objek Penelitian
  - 3.3.1 Keadaan Geografis
  - 3.3.2 Wilayah Administratif
  - 3.3.3 Demografi
  - 3.3.4 Kondisi Perekonomian Provinsi Banten
- 3.4 Gambaran Umum Pandemi Covid-19
- 3.5 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia
- 3.6 Gambaran Kondisi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota pada Provinsi Banten (Tipologi Klassen)
- 3.7 Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Sebelum dan Semasa Pandemi COVID-19 (Indeks Williamson)
  - 3.7.1 Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Sebelum Pandemi COVID-19 (Indeks Williamson)
  - 3.7.2 Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Semasa Pandemi COVID-19 (Indeks Williamson)
- 3.8 Pengujian Hipotesis Kuznet di Provinsi Banten (Korelasi Pearson)
- 3.9 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Peningkatan Tingkat Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Banten semasa Pandemi Covid-19
  - 3.9.1 Perbedaan Struktur Ekonomi yang Kontras
  - 3.9.2 Alokasi Dana Perimbangan Pembangunan Wilayah
  - 3.9.3 Ketimpangan Pendapatan per Kapita

### BAB IV SIMPULAN

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP